



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2023

URUSAN :

Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

URUSAN :

Pelayanan Administrasi
Kependudukan

URUSAN :

Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

**DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Dewi Sartika Nomor 13
Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405
E-mail: dkp3a.kaltim1@gmail.com
Web: www.dkp3a.kaltimprov.go.id
S A M A R I N D A



KATA PENGANTAR

Perencanaan stratejik merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi. Karena itu perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan bagaimana bisa sampai di sana.

Bagimanajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Perencanaan merupakan *starting point* bagi proses-proses manajemen secara keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dengan kata lain perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.

Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur ini dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (*Performance plan* / RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget* / RKA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan DKP3A; dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIp) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Januari 2022

Kepala,

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pemina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002



RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023. Perubahan Kebijakan Nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen perencanaan berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya mengakomodir keputusan Pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kebijakan Nasional yang lain yaitu perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain itu adanya Pandemi COVID-19 berupa pembatasan dan berkurangnya aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Capaian Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dikatakan cukup berhasil dengan uraian sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender

Hasil evaluasi & pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA tahun 2021 bahwa 7 prasyarat PUG telah terpenuhi dengan diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menjadi Utama dan peningkatan PPRG Kaltim tahun 2021 sebesar 1,26% menjadi 5,1% tahun 2022 atau 70 % Perangkat Daerah telah mengimplementasikan PPRG.

2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa kelembagaan perlindungan Anak yang terbentuk adalah UPTD PPA, PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), FABK, PPDJ dan ABK.

3. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Upaya Pengendalian penduduk dilakukan dengan memperhatikan dampak dari Bonus Demografi. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur tahun sampai pada 2035, menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana Program dan Kegiatan pengendalian penduduk.

4. Sistem informasi gender dan anak

Informasi Gender dan Data anak dapat diperoleh melalui Sistem Informasi On Line Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Fasilitas Pelayanan administrasi kependudukan

Rangkaian Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan data, Pembuatan data per semester serta pembuatan profil kependudukan setiap tahun.

Di sisi lain untuk menunjang program dan kegiatan DKP3A selaras dengan visi misi Provinsi Kalimantan Timur dibuat tujuan dan sasaran jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

1. Meningkatkan upaya Perlindungan & Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
 - Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kaltim
 - Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif
 - Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
 - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
 - Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
6. Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana

Setelah dilakukan penyelarasan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2023 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 urusan yaitu urusan pelayanan administrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang cukup penting dan memiliki kontribusi untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif (<i>executive summary</i>)	II
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	VIII
 Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
 Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	61
 Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	65
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	67

Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan	69
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	70
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	97
Bab VIII	Penutup	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan	
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.....	10
Gambar 2.2	
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan	
Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur	10
Gambar 2.3	
Grafik posisi capaian IPG Kalimantan Timur secara nasional tahun 2020.....	24
Gambar 2.4	
Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional.....	25
Gambar 2.5	
Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Kaltim tahun 2018 – 2020	27
Gambar 2.6	
Grafik jumlah kekerasan tahun 2020.....	28
Gambar 2.7	
Grafik Korban Kekerasan Difabel	30
Gambar 2.8	
Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 – 2035	31
Gambar 2.9	
Pilar GDPK Kaltim.....	32
Gambar 2.10	
Data Pilah Gender Perangkat Daerah.....	34
Gambar 2.11	
Grafik capaian layanan administrasi kependudukan	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 2.2	
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan.....	16
Tabel 2.3	
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A.....	16
Tabel 2.4	
Jumlah Aset DKP3A	17
Tabel 2.5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP3A Tahun 2014-2018.....	18
Tabel 2.6	
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah tahun2013– 2018	19
Tabel 2.7	
Tabelkesenjangan IPM terpilahkaltim.....	22
Tabel 2.8	
Capaian IPG Kalimantan Timur.....	23
Tabel 2.9	
Perbandingan capaian komposit IPG 2020	24
Tabel 2.10	
Capaian Komposit IDG Kalimantan Timurtahun 2020	26
Tabel 2.11	
Jumlah penduduk disabilitas Kaltim tahun 2020.....	29
Tabel 2.12	
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga	35
Tabel 2.13	
TabelPerjanjianKerjasamadanAkses di ProvinsidanKabupaten/Kota	37
Tabel 2.14	
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2020.....	37
Tabel 3.1	
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	47

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 53

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra DKP3A Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 57

Tabel 3.4

Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis..... 62

Tabel 3.5

Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis 63

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur 65

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023..... 67

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 69

Tabel 6.1

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif 71

Tabel 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD..... 98



BAB I PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah urusan Pemerintahan konkuren, tidak terkait pelayanan dasar yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemanantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari badan menjadi dinas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi DKP3A dengan mandat 3 urusan yaitu urusan pengendalian penduduk, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur maka disusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rencanan Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Renstra berisi tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun kedepan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. (1) Persiapan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional dalam hal ini RPJMN Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, Renstra BKKBN Tahun 2015-2019; di tingkat provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mengacu pada Visi Gubernur.

Alur dan tahapan penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat digambarkan dalam bagan alur. Penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat dalam Peraturan Menteri 86 tahun 2017, disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB.

Pada awal tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berdampak pada pemberlakuan norma baru, salah satunya larangan untuk berkumpul dan menjaga jarak sehingga berakibat pada aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hilangnya mata pencaharian akibat PHK, meninggalnya kepala keluarga akibat Covid 19, pendidikan jarak jauh, adanya anggota keluarga yang terpapar Covid 19, serta meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan menjadi permasalahan yang lebih kompleks. Perempuan sebagai penanggung jawab urusan domestik rumah tangga merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak Covid 19 tersebut.

Menurut data Gugus Tugas Covid 19 Kaltim sesuai SK Gubernur Kaltim No. 443/K.237/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 per tanggal 31 Agustus 2021 terdapat 150.698 orang positif covid dan 5.071 orang meninggal, selain itu terdapat 6.602 anak laki-laki, dan 6.433 anak perempuan yang terpapar Pandemi Covid serta sebanyak 359 anak yang menjadi yatim piatu akibat orangtuanya meninggal karena Covid-19. Mengingat dampak pandemi berlangsung cukup lama maka pelaksanaan Renstra Perubahan DKP3A 2019-2023 diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, layanan administrasi kependudukan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana baik dalam bentuk pelayanan, kebijakan, administrasi disesuaikan dengan kondisi masa pandemi Covid 19.

Pada tahun yang sama program Pemerintah yang cukup penting dan sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yaitu adanya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga Pemerintah provinsi Kaltim melakukan berbagai penyesuaian dalam perencanaan pembangunan. Memperhatikan dasar Pemerintah untuk mengembangkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ini berdampak pada kesiapan SDM, sarana dan prasarana serta SDA yang memadai. Oleh karena itu DKP3A melalui Renstra Perubahan tahun 2019-2023 mengarahkan pelaksanaan program kegiatan untuk menunjang pengembangan kapasitas SDM terutama perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, pelayanan administrasi kependudukan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembangunan dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana termuat dalam mandat misi satu ***“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas”***.

I. 2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;

2. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
6. Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
7. Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
14. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No.123);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
19. Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Cara perencanaan pengendalian Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur;
31. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
32. Peraturan Gubernur Kaltim No. 443/K.237/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;
33. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

I. 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu lima tahun (Tahun 2019-2023) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

I. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra Kabupaten/Kota.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan periode sebelumnya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Dasar Pembentukan

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

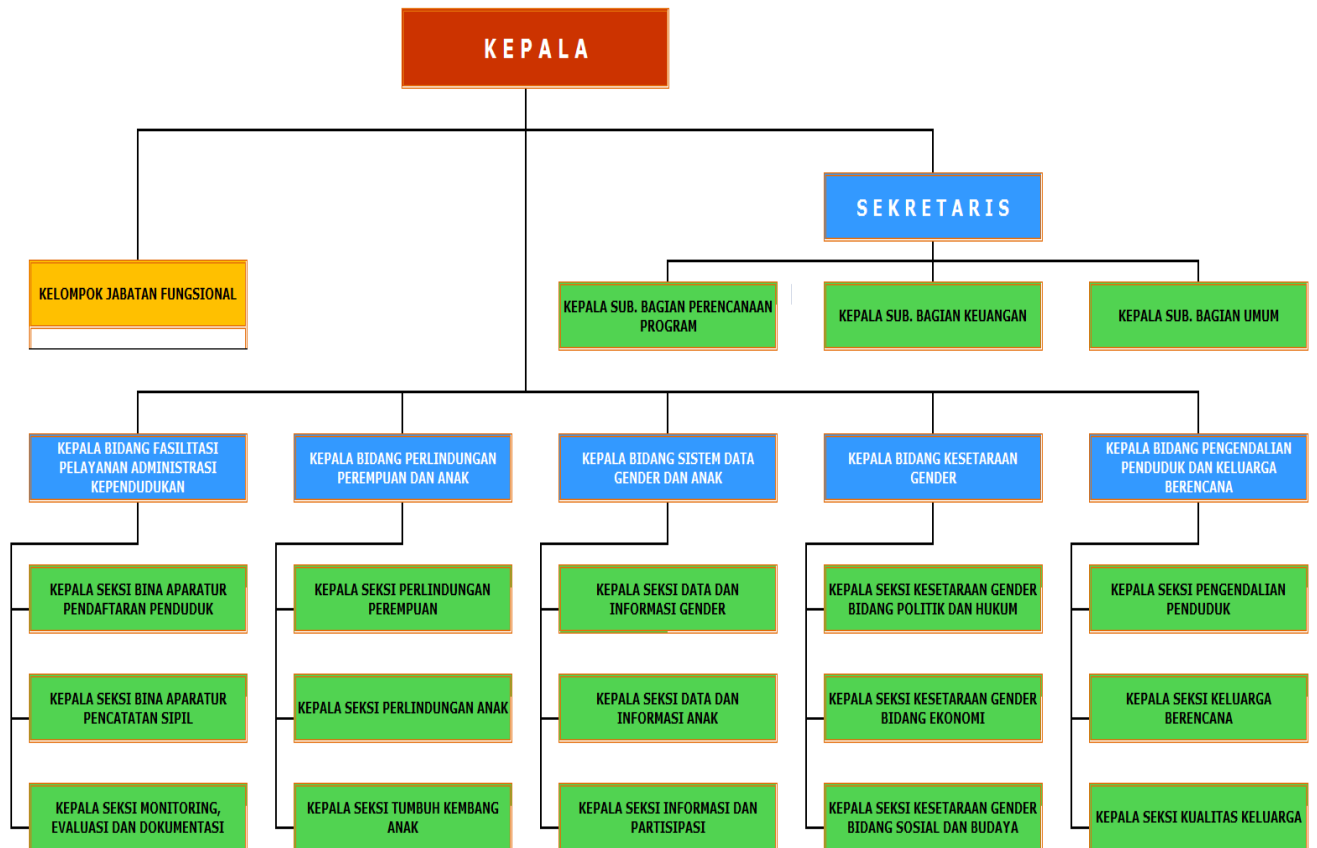
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan komponen-komponen penyusun pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya struktur ini, pekerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai dengan kompetensi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu saja ketika terjadi masalah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur



C. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sistem data gender dan anak;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang fasilitas pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil; Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas,

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan perempuan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sistem data gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;

- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sistem Data Gender dan Anak

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan gender. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender dan anak;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem data gender dan anak;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi gender;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis data dan informasi anak;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengendalian penduduk;

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kualitas keluarga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan korban;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

II. 2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 74 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 53 orang dan Non ASN 21. Pegawai ASN terdiri dari 21 orang Laki-Laki dan 32 orang Perempuan. Tingkat pendidikan pegawai merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi, dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SLTA Sederajat	5	3	7	0	15
2.	D3	1	2	1	1	5
3.	S1	8	17	16	5	46
4.	S2	4	10	0	0	14
5.	S3	0	0	0	0	0
Total		18	32	24	6	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	4	1	5
2.	Golongan III	11	24	35
3.	Golongan IV	3	7	10
Total		18	32	53

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

B. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Gedung A & Halaman	√	√	1
2.	Gedung B	√	√	1
3.	Kendaraan Roda 4	√		8
4.	Kendaraan Roda 2	√		5

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

Selain kondisi sarana dan prasarana diatas termasuk juga aset berupa peralatan dan mesin sebagai penunjang opsional dengan jumlah aset sebesar Rp.5.749.134.985,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 2.4
Jumlah Aset DKP3A

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Aset Tetap	5.749.134.985.00
2.	Tanah	0.00
3.	Peralatan dan Mesin	5.063.358.485.00
4.	Gedung dan bangunan	0.00
5.	Jalan irigasi dan Jaringan	661.033.000
6.	Aset Tetap Lainnya	24.743.500.00
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	0.00
8.	Aset lainnya	0.00
Nilai (RP)		4.720.574.925

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

II. 3 KINERJA PELAYANAN

Kinerja Pelayanan DKP3A merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2019 dapat dilihat dari kinerja capaian indikator dan kinerja anggaran yang selengkapnya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-7					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	-	-	61,69	62	62,59	62,9	63	84,75	85,07	85,6	85,62	-	137,38	137,21	136,76	136,12	-
2.	Prosentase penyelesaian kasus kekerasan	%	-	-	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Peserta KB aktif	%	-	-	357,95	378,29	381,88	397,47	428,46	285,65	351,86	367,08	397,71	442,22	79,80	93,01	96,13	100,06	103,21

Tabel 2.6

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DinasKependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	908.050.000	1.768.050.500	2.008.800.000	1.837.600.932	908.050.000	869.369.396	1.659.191.847	1.872.513.112	1.837.600.932	869.369.396	95,74	93,84	93,22	100,00	95,74	1.486.110.286	1.421.608.937
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.500.000	742.950.000	193.000.000	178.885.000	207.500.000	206.696.106	681.241.939	182.217.634	169.085.183	206.696.106	99,61	91,69	94,41	94,52	99,61	305.967.000	289.187.394
Peningkatan Disiplin Aparatur	385.900.000	35.000.000	78.000.000	40.000.000	385.900.000	372.015.278	35.000.000	58.701.600	19.500.000	372.015.278	96,40	100,00	75,26	48,75	96,40	184.960.000	171.446.431
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	445.000.000	36.200.000	-	274.473.800	445.000.000	424.882.669	25.830.000	-	263.475.300	424.882.669	95,48	71,35	-	95,99	95,48	300.168.450	284.767.660
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	30.000.000	275.600.000	276.750.000	312.000.000	30.000.000	30.000.000	186.900.000	248.069.000	264.143.080	30.000.000	100,00	67,82	89,64	-	100,00	153.087.500	151.822.416
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	49.400.000	411.450.000	558.000.000	134.800.000	49.400.000	48.827.100	378.815.650	523.042.452	124.195.000	48.827.100	98,84	92,07	93,74	92,13	98,84	240.610.000	224.741.460
Keluarga Berencana	22.200.000	687.200.000	295.800.000	1.123.402.128	22.200.000	22.187.200	602.231.000	286.467.900	1.097.120.502	22.187.200	99,94	87,64	96,85	97,66	99,94	430.160.426	406.038.760
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	50.000.000	440.287.000	1.553.900.000	519.400.000	50.000.000	49.913.100	427.793.436	1.501.382.030	514.396.750	49.913.100	99,83	97,16	96,62	99,04	99,83	522.717.400	508.679.683
Kesehatan Reproduksi Remaja	105.700.000	4.264.558.000	266.200.000	87.039.250	105.700.000	99.096.740	3.772.238.656	251.423.000	82.873.500	99.096.740	93,75	88,46	94,45	95,21	93,75	965.839.450	860.945.727
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	30.000.000	454.800.000	650.650.000	29.798.722	30.000.000	30.000.000	454.800.000	616.867.050	21.591.079	30.000.000	100,00	100,00	94,81	72,46	100,00	239.049.744	230.651.626

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000.000	297.350.000	167.600.000	861.864.400	30.000.000	29.720.000	264.109.000	157.281.200	823.803.805	29.720.000	99,07	88,82	93,84	95,58	99,07	277.362.880	260.926.801
Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	30.000.000	208.500.000	1.571.450.000	41.750.000	30.000.000	29.500.000	199.558.400	1.531.627.490	41.700.000	29.500.000	98,33	95,71	97,47	99,88	98,33	376.340.000	366.377.178
Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	30.000.000	3.572.489.250	143.250.000	84.322.600	30.000.000	29.975.000	3.186.179.350	127.640.400	67.251.700	29.975.000	99,92	89,19	89,10	79,76	99,92	772.012.370	688.204.290
Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu	1.539.156.000	176.700.000	161.750.000	168.885.850	1.539.156.000	1.504.807.149	156.203.500	152.504.402	152.852.350	1.504.807.149	97,77	88,40	94,28	90,51	97,77	717.129.570	694.234.910
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	45.000.000	-	316.000.000	911.654.000	45.000.000	45.000.000	-	311.237.878	876.607.600	45.000.000	100,00	-	98,49	96,16	100,00	329.413.500	319.461.370
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	30.000.000	-	1.076.900.000		30.000.000	29.990.000	-	1.014.425.362	-	29.990.000	99,97	-	94,20	-	99,97	378.966.667	358.135.121
Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS	30.000.000	-	55.750.000	51.177.500	30.000.000	29.990.000	-	50.397.500	51.150.000	29.990.000	99,97	-	90,40	99,95	99,97	41.731.875	40.381.875
Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	-	-	126.200.000	1.540.875.000	50.000.000	-	-	126.187.500	-	49.913.100	-	-	99,99	-	99,83	572.358.333	88.050.300
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	105.700.000	-	-	-	-	99.066.740	-	-	-	-	93,72	105.700.000	99.066.740

Kinerja pelayanan DKP3A dapat dinikmati oleh publik dan menjadi bahan laporan dalam pencapaian kinerja meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan capaian kesetaraan gender dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah laki-laki dan perempuan. IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat per penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Untuk IPM terpilah laki-laki mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Menurut data BPS – Statistik Indonesia IPM Kaltim menduduki 3 besar dari 34 Provinsi setelah DKI dan Yogyakarta dengan indeks 81,32 sementara indeks IPM Nasional sebesar 75,98. Dan DKI ada pada 83,66.

Sementara untuk IPM terpilah perempuan Kaltim menduduki peringkat ke 32 dari 34 Provinsi dengan capaian indeks 69,69 pada tahun 2020 dan 70,14 di tahun 2019. Adapun capaian indeks IPM terpilah perempuan DKI mencapai 79,17 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 0,01 dari capaian tahun sebelumnya. Adapun capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kaltim terdapat kesenjangan, dapat dilihat dari capaian indeks 81,32 di tahun 2020, sementara IPM perempuan pada tahun yang sama ada pada indeks 69,69, terjadi kesenjangan indeks sebesar 11,63.

Tabel 2.7

Kondisi kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel kesenjangan IPM terpilah kaltim

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	2020	2019	2020	2019
INDONESIA	69,19	69,18	75,98	75,96
DKI JAKARTA	79,17	79,16	83,66	83,58
KALIMANTAN TIMUR	69,69	70,14	81,32	81,58
Paser	55,1	55,38	77,44	77,55
Kutai Barat	64,27	64,7	76,63	77,17
Kutai Kartanegara	62,36	62,63	79,04	79,14
Kutai Timur	59,79	60,36	78,4	78,89
Berau	69,46	69,74	79,28	79,31
Penajam Paser Utara	65,74	65,91	76,1	76,44
Mahakam Ulu	59,81	60,28	73,86	74,52
Kota Balikpapan	76,33	76,45	85,14	85,22
Kota Samarinda	75,29	75,48	84,34	84,42
Kota Bontang	73,77	73,84	84,92	85,15

Sumber Data : BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas masih terdapat kesenjangan laki-laki dan perempuan pada proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan.

Kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami kendala. Ditandai oleh penurunan angka IPM sebesar 0,48 persen, setelah sebelumnya tumbuh positif sebesar 1,03 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, status pembangunan manusia di Kalimantan Timur berada pada level atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan status pada tahun sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IPG Kaltim dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian IPG Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020	2019	2018
INDONESIA	91,06	91,07	90,99
DKI JAKARTA	94,63	94,71	94,7
KALIMANTAN TIMUR	85,70	85,98	85,63
Paser	71,15	71,41	70,64
Kutai Barat	83,87	83,84	83,52
Kutai Kartanegara	78,9	79,14	78,83
Kutai Timur	76,26	76,51	76,03
Berau	87,61	87,93	87,92
Penajam Paser Utara	86,39	86,22	86,34
Mahakam Ulu	80,98	80,89	80,18
Kota Balikpapan	89,65	89,71	89,76
Kota Samarinda	89,27	89,41	89,42
Kota Bontang	86,87	86,72	86,61

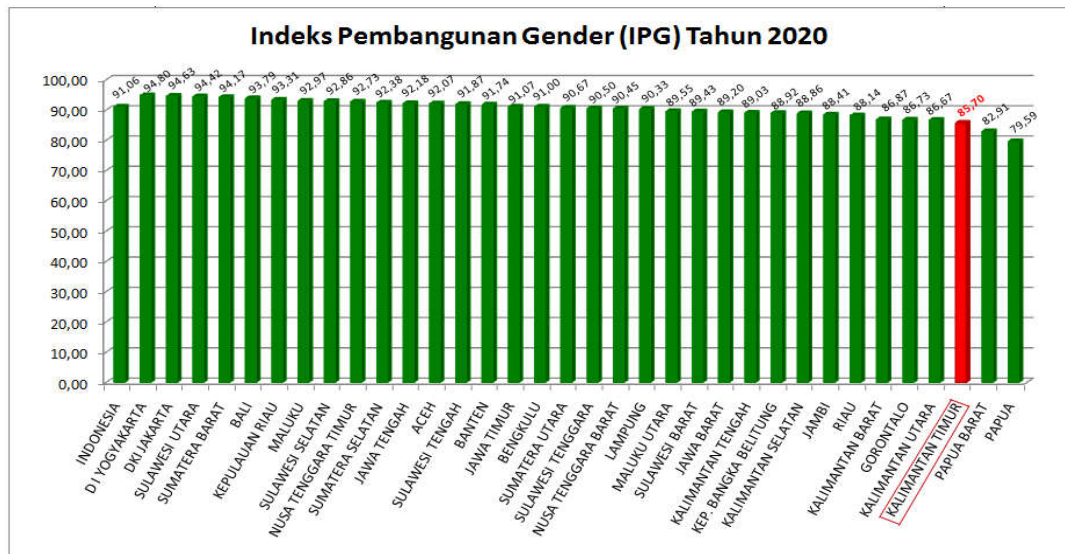
Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas, capaian indeks Kaltim berada di bawah indeks nasional, dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kaltim perlu melakukan percepatan pembangunan gender terkait adanya IKN. Posisi Kaltim berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan misi pertama gubernur Kalimantan timur yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan disabilitas. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Gambar 2.3

Grafik posisi capaian IPG Kalimantan Timur secara nasional tahun 2020



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Pendapatan. Capaian komposit sumbangan pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup tajam dibanding Sumbangan Perkapita Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun untuk ketiga komposit lainnya AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan telah dapat melampaui angka capaian Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.9

Perbandingan capaian komposit IPG 2020

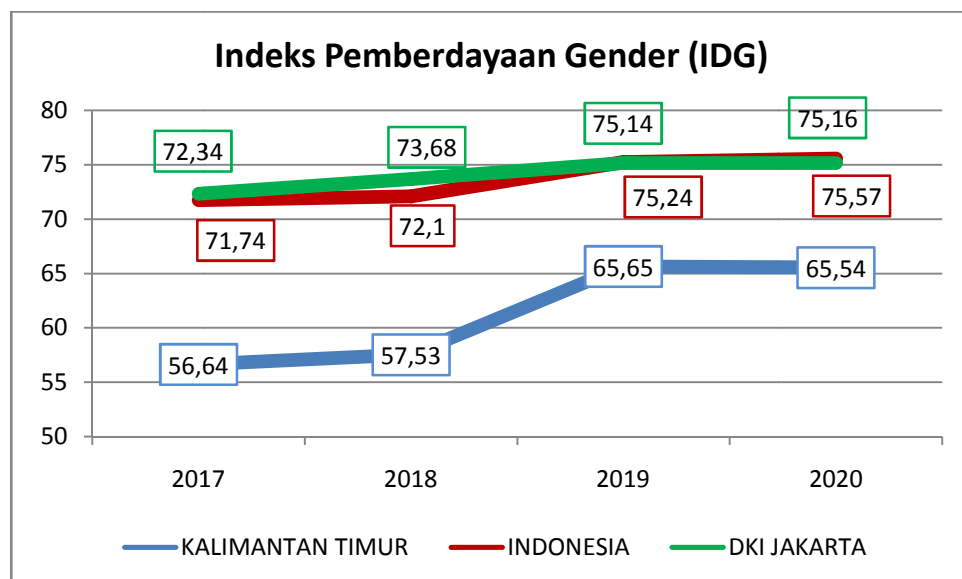
No	Komposit	Kaltim (2020)		DKI Jakarta (2020)		Indonesia (2020)	
		L	P	L	P	L	P
1.	Angka harapan Hidup (AHH)	72.54	76.21	71,01	74.08	69.59	73.46
2.	Rata rata lama Sekolah (RLS)	10.22	9.27	11.15	10.76	8.90	8.07
3.	Harapan lama Sekolah (HLS)	13.71	13.87	13.00	12.94	12.93	13.04
4	Pengeluaran Pendapatan	17.958	6.943	22.614	16.742	15.463	9.004

Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk menetapkan program dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong capaian IPG Kalimantan Timur.

Selain IPG capaian indikator kesetaraan gender lainnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indikator yang melihat pemberdayaan perempuan pada peranan dan partisipasi di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Posisi capaian IDG Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan 0,11 dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami kenaikan 0,33 sebagai pembandingan menuju IKN, berikut disertakan data IDG DKI Jakarta, dimana mengalami kenaikan sebesar 0,02. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.4
Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional



Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IDG meliputi komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Komposit IDG Kalimantan Timurtahun 2020

No	Komposit	Kalimantan Timur	DKI Jakarta	Nasional
1.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	45.86	46,10	48.76
2.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	24.17	38,06	37.26
3.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	18.18	21,07	21.09

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian pada komposit perempuan sebagai tenaga Profesional Kaltim masih dibawah rata-rata DKI Jakarta dan Nasional, demikian pula dengan komposit sumbangan pendapatan perempuan masih jauh dibawah capaian nasional dan DKI Jakarta, pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen sama keadaannya dengan dua komposit lainnya, hal ini menempatkan IDG Kaltim berada pada posisi di 32 dari 34 provinsi se Indonesia.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan berbasis gender digunakan strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya (1) kelembagaan (2) komitmen (3) kebijakan (4) Data pilah (5) Metode (6) partisipasi masyarakat (7) SDM dan anggaran. Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi PUG melalui penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kaltim}} \times 100 \%$$

Sedangkan Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu persentase pelaku ekonomi perempuan dengan rumusan :

$$\frac{\text{Pelaku Ekonomi Perempuan}}{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi}} \times 100 \%$$

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

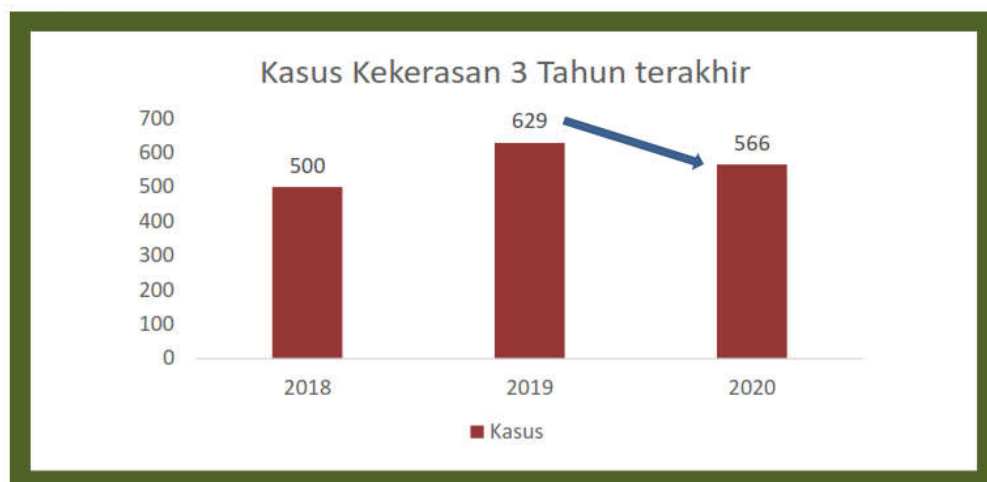
Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan Gender adalah Tindak Kekerasan, perdagangan orang, korban pornografi, dll.

Bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, ekonomi. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak korban bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 566 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam Grafik berikut :

Gambar 2.5

Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Kaltim tahun 2018 - 2020



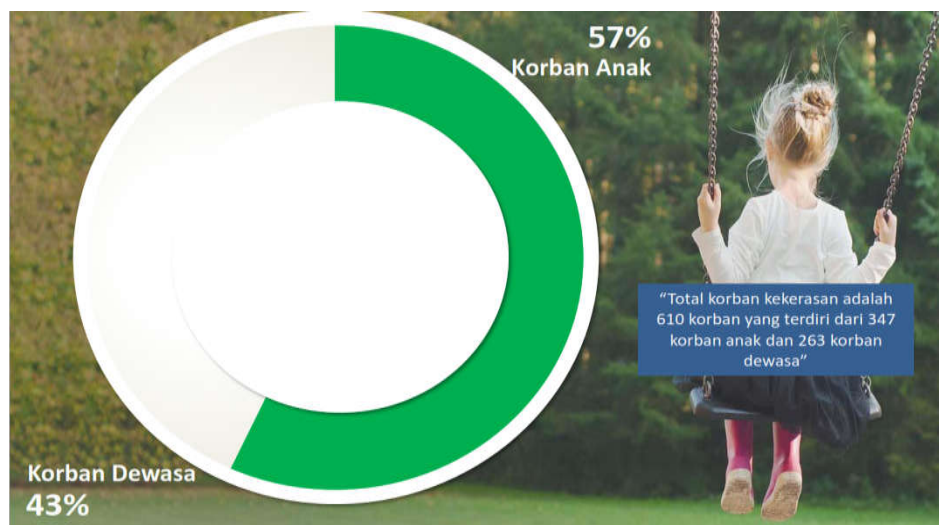
Sumber data :Simfoni PPPA Update data per 1 Januari 2021

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk pelanggaran hak anak adalah kekerasan terhadap anak berikut data kekerasan anak tahun

Berdasarkan data simfoni tahun 2020 terdapat jumlah kekerasan pada anak 347 kasus, tertera dalam Grafik berikut :

Gambar 2.6

Grafik jumlah kekerasan tahun 2020



Sumber data :Simfoni PPPA

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.11

Jumlah penduduk disabilitas tahun 2020
Kalimantan timur Tahun 2020

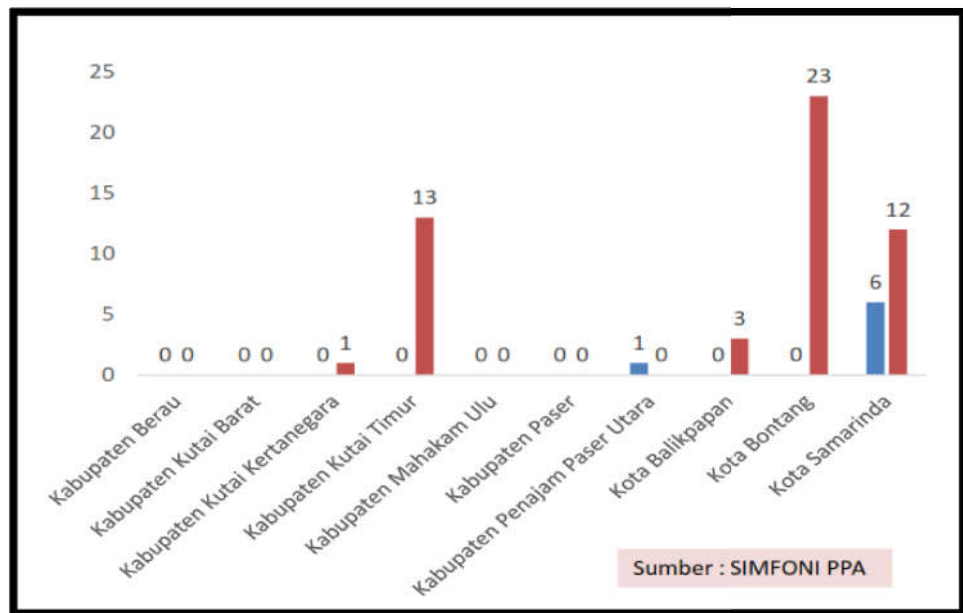
No	Kabupaten/Kota	Cacat Fisik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Mental Jiwa	Cacat Fisik Mental	Cacat Lainnya
1	PASER	2	0	2	0	0	0
2	KUKAR	40	5	6	6	3	16
3	BERAU	5	1	2	0	3	3
4	KUBAR	2	1	1	0	2	6
5	KUTIM	11	4	5	0	1	13
6	PPU	7	1	1	1	1	2
7	MAHAKAM ULU	7	0	3	1	2	1
8	BALIKPAPAN	12	1	4	0	0	2
9	SAMARINDA	10	5	5	1	1	2
10	BONTANG	9	0	2	1	0	6
JUMLAH		105	18	31	10	13	51

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Disabilitas/Kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasannya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel kaltim tahun 2020

Gambar 2.7
Grafik Korban Kekerasan Difabel



Sumber data : Simfoni PPPA

Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal aksesibilitas, akomodasi layak, tapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan.

Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Rasio KDRT dengan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

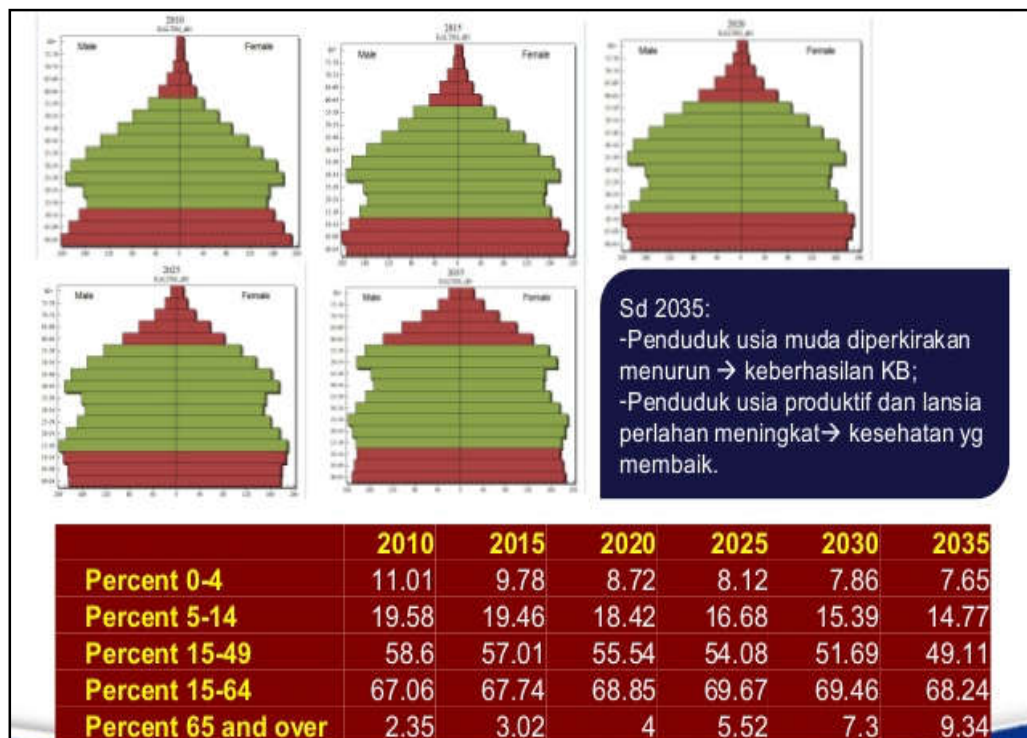
1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan. Pengendalian kependudukan dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu di masa yang akan datang.

Masalahkependudukan adalah masalah Pemerintahan baik menyangkut aspek pemerintahan, administrasi, sosial, ekonomi, budaya, maupun kesejahteraan. Penduduk atau rakyat adalah aset utama dari suatu negara yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Kondisi Proyeksi Penduduk Kaltim dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.8

Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi KalimantanTimur tahun 2010 - 2035



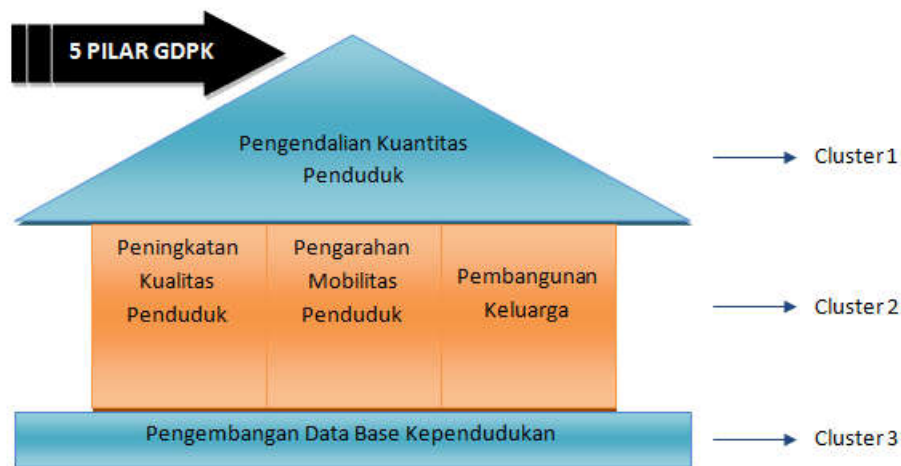
Sumber data : BPS RI

Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk angkatan kerja lebih banyak dari pada penduduk anak dan lansia. Sehingga penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll memerlukan kebijakan yang strategis dan menjadi kebutuhan utama.

Jumlah sebaran penduduk yang kurang merata dengan masih terpusat pada kawasan pemerintahan, berdampak pada kualitas hidup, kerusakan hutan dan lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lain-lain. Sebaran penduduk yang kurang merata juga akan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan. Untuk itu diperlukan proses perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara variabel demografi

dengan variabel pembangunan. Penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat diperlukan. Berikut GDPK Kaltim tahun 2020 sebagai panduan dalam kerangka berpikir guna mencapai pembangunan kependudukan.

Gambar 2.9
Pilar GDPK Kaltim



Sumber data : DKP3A Kaltim

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kaltim setiap lima tahun meningkat rata-rata 4,41%. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Lima tahun kemudian meningkat 5,86% menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030, jumlah penduduknya meningkat 5,02% menjadi 4 juta jiwa. Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan meningkat 5,8% dari lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25 juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta. Sementara laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebanyak 1,93 di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional 1,25% per tahun. Hal tersebut memerlukan antisipasi dini berupa implementasi GDPK dan pelaksanaan teknis dalam Program KB secara terintegrasi.

Pelayanan Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dalam mencapai pembangunan kependudukan.

3. Sistem Informasi Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Sistem data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data anak adalah data kondisi anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur.

Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak, serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan anak. Antara lain : 1) Indikator dan jenis data yang dibutuhkan, 2) Pengumpulan data, 3) Metode pengumpulan dan alur data, 4) Periode pengumpulan data, 5) Penerima Manfaat.

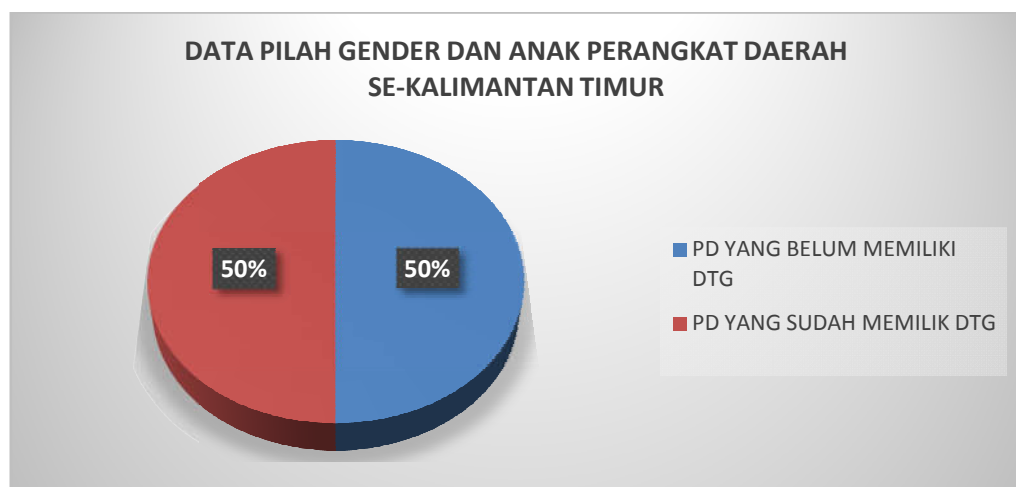
Data Terpilah Gender (DTG) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pengarusutamaan gender (PUG) dan merupakan bagian penting dari proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). DTG merupakan indikasi awal ada atau tidaknya sebuah kesenjangan. Hal ini bisa menjadi basis

kajian lebih dalam terkait kesenjangan yang ada. DKP3A sebagai fasilitator DTG dan Diskominfo Provinsi Kaltim sebagai wali data mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi DTG Perangkat Daerah yang diperlukan guna penyusunan kebijakan Program Kegiatan yang responsif gender.

Data Terpilah Anak merupakan Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih. 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi

Dari 34 perangkat daerah yang merupakan kelompok Kerja (POKJA) Data Terpilah yaitu wadah komunikasi di Provinsi Kaltim untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender, terdapat 50% Perangkat Daerah yang sudah memiliki DTG, tertera dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 2.10
Data Pilah Gender Perangkat Daerah



Sumber data : DKP3A Kaltim

Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, salah satu kelompok data gender yang digunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaku usaha ekonomi perempuan dan program kegiatan lainnya.

Tabel 2.12

Data Jumlah Penduduk Kab/Kota

Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan	Perempuan Kepala Rumah Tangga
1	PASER	133.403	14.535
2	KUTAIKARTANEGARA	351.783	39.635
3	BERAU	117.957	12.140
4	KUTAI BARAT	79.026	8.828
5	KUTAI TIMUR	197.365	18.961
6	PENAJAMPASER UTARA	87.394	9.508
7	MAHAKAM ULU	16.334	2.256
8	KOTA BALIKPAPAN	340.436	48.025
9	KOTA SAMARINDA	401.072	50.688
10	KOTA BONTANG	88.761	9.183
JUMLAH		1.813.531	213.759

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2020

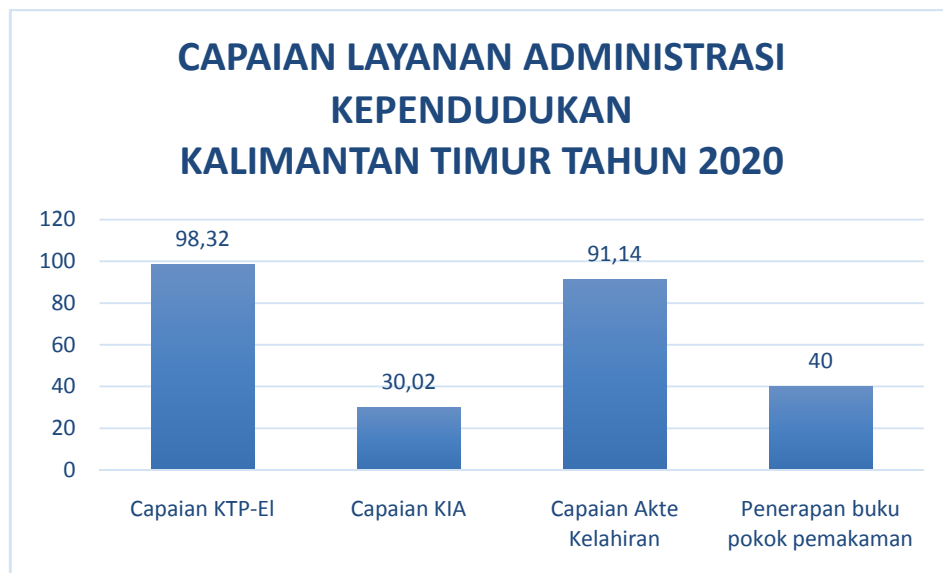
Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja pelayanan pemanfaatan data gender dan anak maka digunakan formula perhitungan capaian program SIGA sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$$

4. Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun jenis administrasi pelayanan kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Berikut capaian layanan kinerja administrasi kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan program kegiatan terkait pemenuhan hak sipil penduduk Kaltim.

Gambar 2.11
Grafik capaian layanan administrasi kependudukan



Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berguna sebagai bahan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Demikian pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan maka telah dilakukan berbagai Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk dapat menggunakan hak akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Berikut keadaan PKS dan akses Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Tabel 2.13

Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	PKS S/D 31 Des 2020	Akses DWH S/D 31 Des 2020	PKS S/D 31 Jan 2021	Akses DWH S/D 31 Jan 2021
1	Provinsi	7	4	7	4
2	Kutai Kartanegara	28	4	28	4
3	Balikpapan	10	9	10	9
4	Kutai Timur	14	1	14	1
5	Samarinda	12	8	12	8
6	Berau	5	0	5	0
7	Paser	20	1	20	1
8	Bontang	9	9	9	9
9	Kutai Barat	9	1	9	1
10	Mahakam Ulu	0	0	0	0
11	PPU	5	1	5	1

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Salah satu kelompok data yang memenuhi hak akses yang digunakan oleh berbagai sektor adalah keadaan jumlah penduduk Kaltim seperti tertera dalam table berikut:

Tabel 2.14

Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin				Jumlah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
	L	%	P	%				
Paser	143.998	52	133.403	48	277.401	10	139	5
Kukar	382.702	52	351.783	48	734.485	18	193	44
Berau	133.482	53	117.957	47	251.439	13	100	10
Kutai Barat	86.912	52	79.026	48	165.938	16	190	4
Kutai Timur	226.969	53	197.365	47	424.334	18	134	1
PPU	93.955	52	87.394	48	181.349	4	30	24
Mahulu	18.676	53	16.334	47	35.010	5	50	-
Balikpapan	356.643	51	340.436	49	697.079	6	-	34
Samarinda	416.182	51	401.072	49	817.254	10	-	59
Bontang	96.023	52	88.761	48	184.784	3	-	15
Jumlah	1.955.542	52	1.813.531	48	3.769.073	103	836	196

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri SMS II Tahun 2020

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja layanan administrasi kependudukan maka digunakan formula perhitungan capaian Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender} \times 100\%}{\text{Jumlah perangkat daerah}}$$

5. Pelayanan Kesekretariatan

Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Adminiatriasi Perkantoran dengan indikator Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan 2023 mencapai kepuasan 90%. Adapun kegiatan meliputi ;
 - a. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator kondisi gedung kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.
2. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja pelayanan tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi :
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Kelemgkapan Sarana dan prasarana mendukung unit kerja dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.
3. Program Penusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP#A, Adapun kegiatan meliputi :
 - a. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan indikator laporan kinerja tepat waktu.
 - b. Rakor Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator adanya rekomendasi PPPA.
 - c. Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta Pelayanan Administrasi kependudukan.
 - d. Pameran hasil Karya perempuan bidang pembangunan.
4. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah, dengan kegiatan meliputi :
 - a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

II. 4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisisnya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis)*. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.
- b. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.
- c. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, meliputi Gugus Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja PUG.
- d. Bonus Demografi dalam penyediaan lapangan kerja perempuan, pengendalian penduduk pendatang menjadi kelompok termarginal menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Ditunjang dengan kurangnya informasi lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbatasnya jumlah lembaga layanan rehabilitasi
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas anak, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya tugas kewenangan Provinsi dalam program pengendalian penduduk dan KB.
- j. Komposisi Penduduk Kalimantan Timur memberi dampak bonus demografi yang harus dikelola sebagai sumber daya manusia potensial mengingat jumlah penduduk produktif lebih banyak dari kelompok usia anak dan lansia.
- k. Kelompok penduduk usia remaja yang cenderung rentan terkena dampak kesehatan reproduksi adalah remaja putus sekolah, remaja jalanan, remaja penyalahguna napza, remaja yang mengalami kekerasan seksual, korban perkosaan dan pekerja seks komersial
- l. Mobilitas Penduduk membutuhkan percepatan penyelenggaraan administrasi pelayanan penduduk.
- m. Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan.
- n. Kurangnya tenaga / SDM secara Kualitas dalam penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat mempengaruhi proses pelayanan bahkan terhadap penghapusan restrisbusi / biaya untuk beberapa pelayanan surat dan dokumen kependudukan.
- o. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
- p. Letak Geografis yang tidak memungkinkan dalam Penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah serta adanya pengaruh kemajuan dibidang teknologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dokumen Kependudukan.

B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode untuk menganalisanya, yaitu dengan menggunakan metode *SWOT Analysis* (*strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis*). Identifikasi tantangan DKP3A Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Adanya mandat dalam UU no 23 tahun 2014, PP no 18 tahun 2016 untuk melakukan pengembangan organisasi menjadi Organisasi Perangkat daerah yang lebih teknis
- b. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra kerja memberi dukungan dalam pelaksanaan PUG.
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Adanya jejaring kerja lintas sektor dan multi program untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan Timur.
- h. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi Informatika (TI) dengan pengoprasian SIAK sampai dengan ditingkat Kecamatan dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid sebagai dasar Penentuan Kebijakan.

- i. Ketersediaan peraturan perundang–undangan yang mengatur penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan mempermudah pemberian pelayanan pendaftaran kependudukan yang cepat, murah, dan mudah serta akurat.
- j. Ketersediaan anggaran/dana dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendaftaran Kependudukan akan mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat, dalam pengurusan penerbitan surat keterangan dan dokumen kependudukan yang berbasis teknologi informasi.
- k. Tersedianya Data Base Kependudukan dalam pengelolaan pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan terdeteksi terkait adanya mobilisasi penduduk (perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)
- l. Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penguatan program dan kegiatan Pembangunan Bidang pengendalian penduduk dan KB
- m. Kewenangan untuk melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
2.
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Hasil evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
 - c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - d. Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
 - e. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
 - f. Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik.
 - g. Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
3. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - a. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki.
 - b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - e. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.

- f. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suami/anak laki-lakinya.
 - g. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi.
4. Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:
- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan melaporkan karena menanggung aib keluarga, atau karena tidak mengetahui lembaga layanan.
 - Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas
 - Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan
 - Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis.
 - b. Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.
 - c. Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dll.
 - d. Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan perlindungan hak perempuan.
5. Permasalahan Perlindungan Anak:
- a. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - b. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
 - c. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak.
 - d. Belum seluruh kabupaten/kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - e. Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.
 - f. Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan baik.

6. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:
 - a. Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
 - b. Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
 - c. Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.
 - d. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - e. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - f. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 - g. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll)
 - h. Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.
7. Permasalahan Sistem Informasi Gender dan Anak.
 - a. Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru
 - b. Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak
 - c. Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
 - d. Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
 - e. Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.
8. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB
 - a. Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok marjinal.
 - b. Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.
 - c. Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga
 - d. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB
 - e. Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan pertama belum optimal.

9. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - a. Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam penyediaan data terpilah atau data gender.
 - b. Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait

III. 2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke pada lima tahun depan, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam lainnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera. Indeks Kebahagiaan masyarakat Kalimantan Timur tahun 2017 berada pada point 73,57 melampaui indeks kebahagiaan nasional 70,69 berada pada rangking ke4 secara nasional. Kondisi awal ini menjadi langkah pertama untuk melaksanakan capaian visi agar Indeks Kebahagiaan Kalimantan Timur bisa lebih meningkat.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan kesetaraan gender ditandai dengan peningkatan peran perempuan dalam politik, pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat merupakan salah satu isu strategis pembangunan yang tertera dalam RPJMD Prov Kalimantan Timur periode 2019-2013. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha mencapai visi tersebut berdasarkan pada tugas fungsi dan kewenangan dengan mengacu pada misi yang ditentukan yaitu misi ke-2 dan misi ke-5. Capaian Visi Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi misi, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat				
No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 1	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas			
Tujuan 1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia			
1.	Sasaran ke-4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	<div><div>1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor</div><div>2. Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG</div><div>3. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki, sehingga diperlukan berbagai alternatif jaminan, layanan, program dan kegiatan secara khusus bagi perempuan lansia.</div><div>4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</div><div>5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini berdampak pada capaian IDG Kalimantan Timur yang berada di tingkat 29 dari 34. Provinsi.</div><div>6. Kesenjangan pendapatan</div></div>	<div><div>1. OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan</div><div>2. Lembaga PUG DKP3A belum berperan sesuai tugas fungsi</div><div>3. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif</div><div>4. Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer.</div><div>5. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di</div></div>	<div><div>1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana</div><div>2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijakan</div><div>3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (PT, Dunia Usaha, LM, Profesi dll)</div><div>4. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel.</div><div>5. Adanya regulasi yg memandatkan layanan bagi perlindungan Perempuan oleh Negara</div><div>6. Dukungan pemerintah pusat</div></div>

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.</p> <p>7. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar.</p> <p>8. Pencabutan kewenangan P2TP2A dalam Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan belum di tindaklanjuti dengan keberadaan UPTD PPA</p> <p>9. Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A.</p> <p>10. Jumlah dan kualitas Lembaga pemerhati perempuan merupakan potensi, sehingga perlu dilakukan peningkatan partisipasi.</p> <p>11. Percepatan layanan system administrasi kependudukan memerlukan kreatifitas dan inovasi terutama dalam dalam mendorong pemanfaatan data</p> <p>12. Bonus Demografi Prov Kalimantan Timur, menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif, perlu strategi pembangunan agar peningkatan kualitas SDM dan pengendalian penduduk dapat berjalan</p>	<p>tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas tenaga kerja, disperidakop, Perbankan, DII).</p> <p>6. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>7. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>8. Aplikasi data SIMFONI belum bisa didayagunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan PPPA</p> <p>9. Peran Fungsi dan kewenangan unit pelayanan terpadu Daerah bidang PPPA lainnya belum optimal</p> <p>10. Terbatasnya personil petugas teknis yg bersertifikat dalam penanggulangan kekerasan</p>	<p>dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil</p> <p>7. Adanya Apresiasi Pemerintah dalam penganugerahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok disabilitas.</p> <p>8. Komitmen Pemerintah Prov Kalimantan Timur terhadap perlindungan anak tertuang dalam Misi lima</p> <p>9. Kewenangan DKP3A untuk mendorong percepatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.</p>

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		selaras.	11. Terbatasnya jumlah ADB (administrator data Base) 12. Kualitas jaringan internet tidak stabil, berpengaruh pada ketepatan waktu pelayanan administrasi kependudukan 13. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/pr ofil kependudukan oleh stakeholder terkait 14. Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB 15. Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat 16. Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan	

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			calon pengantin 17. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB	

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan relevansinya dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan dasar kedaulatan. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menydaa tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Tugas dan Kewenangan DKP3A Prov Kalimantan Timur dalam mencapai Visi, bertumpu pada Misi 1 dan Misi 5. Misi 1 yaitu **“Berdaulat dalam pembangunan Sumber daya manusia yang berahlak Mulia dan Berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”**dengan mengacu pada :

1. Meningkatnya PUG melalui indikator Capaian IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.

Jurang Kesenjangan prmbangunan di Kalimantan Timur nampak dengan membandingkan capaian IPM dan IPG serta IDG. Indeks pembangunan Manusia Prov Kalimantan Timur berada pada peringkat 4 dari 34 Provinsi di Indonesia, hal tersebut tidak diiringi dengan capaian Indeks Pembangunan dan

Pemberdayaan Gender, yaitu menempati rangking ke 29 dari 34 seluruh Provinsi Di Kalimantan Timur.

Salah satu komposit indikator yang berkaitan terhadap kesenjangan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur adalah Adanya keteringgalan dalam aspek ekonomi, pada tabel 13 dua tahun terakhir capaian Pengeluaran perkapita laki laki Prov Kalimantan Timur menempati point 17 sementara pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timurada point 6.

Kesenjangan ini menggambarkan proses pembangunan di bidang ekonomi belum mengakomodir karakteristik perempuan i dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, PUG diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua; dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan strategi Pembangunan berbasis PUG adalah dengan adanya Peraturan Daerah Prov Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembangunan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dikuatkan dengan adanya Kelompok Kerja PUG Prov Kalimantan Timur yang bertugas untuk mendorong pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsife Gender agar pembangunan lebih terarah kepada kesetaraan Gender.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang memang dibutuhkan.

Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak. Padahal kerentanan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Hal tersebut menjadi masalah yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Data Simfoni PPA(Sistin Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tiga tahun terakhir sampai bulan November 2018 tindak kekerasan pada anak mengalami penurunan (tabel 11), Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon perlindungan anak , terutama pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban kekerasan diwujudkan melalui program Prioritas yaitu Program Penurunan Perkawina Usia Anak

Menurut data DKP3A tahun Perkawinan Usia anak di Kalimantan Timur cukup tinggi, tertera dalam tabel sebagai berikut :

Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang positif dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan. Anak yang memasuki perkawinan pasti mengalami putus sekolah karena syarat untuk bersekolah usia 18 tahun tidak menikah. . Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia anak mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena

kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya pekerja anak. Anakharus bekerja untuk menafkahi keluarga, karena bekerja dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga berdampak pada pendapatan upah yang rendah. Kondisi ini dapat memicu terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuangkan kepedulian terhadap Perlindungan Anak dengan mengacu pada Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) meliputi 1) Hak sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan 5) Perlindungan Khusus. Penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dan program-program pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh diletakkan di atas empat prinsip dengan yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan d) penghargaan terhadap pandangan anak.

III. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN RENSTRA

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor. 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 5. Keterlibatan perempuan di lembaga	1. Dokumen perencanaan program belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 2. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor.	1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana 2. Adanya kebijakan PUG yang mendukung 3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>6. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam kepemilikan usaha, Kepemilikan diserahkan kepada suaminya atau anak laki-laki.</p> <p>7. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi</p> <p>8. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</p> <p>9. Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan kepada suaminya.</p>	<p>3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain</p> <p>4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100</p> <p>5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</p> <p>6. koordinasi antar OPD</p>	<p>4. Beberapa urusan dlm dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi</p> <p>5. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>6. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota</p>
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	<p>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p> <p>2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari rasio kekerasan Kalimantan Timur</p> <p>3. Aplikasi SIMFONI PPPA belum optimal digunakan sehingga data Kekerasan tidak sesuai fakta lapangan, menyulitkan dalam pengambilan kebijakan dan program kegiatan</p> <p>4. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>5. Fungsi dan peran gugus tugas TPPO belum optimal</p>	<p>1. Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>2. Tidak semua korban tidak memahami adanya layanan rujukan</p> <p>3. Minimnya keterampilan teknis SDM pengelola Symfoni</p> <p>4. Belum tersedianya data tenaga</p>	<p>1. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>2. Tersedianya layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		6. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.	kerja prmpuan korban kekerasan	Kab Kota
3	Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) 2. Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang disabilitas 3. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak. 4. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll) 5. Belum semua anak akses akte kelahiran. 6. Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak . 7. Aksesibilitas anak yang mengikuti PAUD masih terbatas. 8. Masih adanya balita kurang gizi 9. Kurangnya engetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan. 10. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak. 11. Belum optimalnya fungsi lembaga pemerhati anak khususnya pada penurunan angka usia perkawinan anak. 12. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak 13. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. 14. Belum seluruh kabupaten kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak dan masih perlu penguatan. 2. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD yang berperan 3. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan angka Perkawinan Usia Anak 	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		memiliki Data Base tentang anak (anak putus sekolah, pekerja anak, dll) 15. Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu kebijakan, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota Layak Anak.		
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan Hak Anak. 2. Pendatan dan pemetaan peran organisasi pemerhati perempuan dan anak belum dilaksanakan. 3. Diperlukan peningiatan kualitas kelembagaan pada organisasi pemerhati perempuan dan anak , sehingga lebih berdaya guna bagi perlindungan perempuan dan anak. 	1. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak belum optimal dalam menyuarakan PUHA	

III. 4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sasaran Renstra DKP3A Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pengarusutaman Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi strategi pembangunan seluruh sektor. 2. Dokumen perencanaan penganggaran belum seluruhnya disusun berdasarkan PPRG 3. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup laki-laki, sehingga diperlukan berbagai alternatif jaminan, layanan, program dan kegiatan secara khusus bagi perempuan lansia. 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini berdampak pada capaian IDG Kalimantan Timur yang berada di tingkat 29 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OPD belum menuangkan PPRG menjadi dasar dalam pencapaian kinerja Program Kegiatan 2. Lembaga PUG DKP3A belum berperan sesuai tugas fungsi. 3. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif. 4. Pelaksanaan Program kegiatan Pendidikan Politik perempuan bersifat temporer. 5. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya (Dinas tenaga kerja, disperidakop, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana 2. Adanya kebijakan PUG Kalimantan Timur menjadi pedoman seluruh penentu kebijakan. 3. Adanya mitra kerja dalam implementasi PUG (PT, Dunia Usaha, LM, Profesi dll) 4. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok difabel. 5. Dukungan pemeritah pusat dan daerah dalam penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil 6. Adanya regulasi yg memandatkan layanan bagi perlindungan Perempuan oleh Negara 7. Adanya Apresiasi Pemerintah dalam penganugerahan pembangunan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>dari 34. Provinsi.</p> <p>6. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari pendapatan penduduk perempuan.</p> <p>7. Minimnya pelaku usaha ekonomi perempuan yang terdaftar.</p> <p>8. Pencabutan kewenangan P2TP2A dalam Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan akan di tindaklanjuti dengan pembentukan UPTD PPA(dalam proses)</p> <p>9. Penyediaan data pilah terkait capaian indikator kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan tugas dan kewenangan bidang pada lingkup DKP3A.</p> <p>10. Jumlah dan kualitas Lembaga pemerhati perempuan merupakan potensi, sehingga perlu dilakukan peningkatan partisipasi.</p> <p>11. Percepatan layanan system administrasi kependudukan memerlukan kreatifitas dan inovasi terutama dalam dalam mendorong pemanfaatan data</p> <p>12. Bonus Demografi</p>	<p>Perbankan, DII),</p> <p>6. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui online (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>7. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan & anak.</p> <p>8. Aplikasi data SIMFONI belum bisa didayagunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan PPPA</p> <p>9. Peran Fungsi dan kewenangan unit pelayanan terpadu Daerah bidang PPPA lainnya belum optimal .</p> <p>10. Terbatasnya personil petugas teknis yg bersertifikat dalam penanggulangan kekerasan.</p> <p>11. Terbatasnya jumlah ADB (administrator data Base)</p> <p>12. Kualitas jaringan internet tidak stabil, berpengaruh pada ketepatan waktu pelayanan administrasi</p>	<p>pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan kelompok disabilitas.</p> <p>8. Komitmen Pemerintah Prov Kalimantan Timur terhadap perlindungan anak tertuang dalam Misi lima.</p> <p>9. Kewenangan DKP3A untuk mendorong percepatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan.</p> <p>10. Ketersediaan SDM dan Sarana prasarana</p> <p>11. Adanya kebijakan PUG yang mendukung</p> <p>12. Adanya mitra kerja dalam pelaksanaan PUG (Universitas, Dunia Usaha, Profesi dll)</p> <p>13. Beberapa urusan dlm dinas DKP3A PROVINSI KALIMANTAN TIMUR memudahkan koordinasi</p> <p>14. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>15. Tersedianya Pusat layanan terpadu bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi dan Kab Kota</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ProvKalimantan Timur, menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk nonproduktif, perlu strategi pembangunan agar peningkatan kualitas SDM dan pengendalian penduduk dapat berjalan selaras.	<p>kependudukan.</p> <p>13. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil kependudukan oleh stakeholder terkait.</p> <p>14. Kurang optimalnya koordinasi dengan institusi Program KB.</p> <p>15. Belum tersedianya transfer data antara BKKBN dengan DKp3A sehingga pengelolaan data menjadi terhambat.</p> <p>16. Perlu dilakukan penguatan komitmen pada pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya pada program kegiatan calon pengantin.</p> <p>17. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB</p>	
2.	Meningkatnya perlindungan anak	<p>1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban pornografi, anak korban trafficking , anak korban kekerasan dll</p> <p>2. Pudarnya fungsi keluarga dan lingkungan sekitar</p>	<p>1. Belum adanya regulasi daerah tentang penurunan angka Perkawinan Usia Anak.</p> <p>2. komitmenpara pemangku kepentingan dalam pengembangan Forum Anak perlu</p>	<p>1. Adanya apresiasi baik Pemerintah atau bagi dalam penyelenggaraan PUHA Terbaik.</p> <p>2. Isu anak menjadi isu strategis oleh seluruhsektor.</p> <p>3. Kemitraan dengan lembaga pemerhati</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>dalam penanaman nilai nilai luhur untuk menunjang tumbuh kembang anak</p> <p>3. Kepemilikan Akte kelahiran dan kartu identitas sebagai pemenuhan hak sipil anak perlu segera dipenuhi .</p> <p>4. Kesenjangan fasilitas publik dengan fasilitas ramah anak masih cukup tinggi (sekolah, puskesmas dll)</p> <p>5. Pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan memerlukan wadah dan dukungan semua pihak.</p> <p>6. Untuk ketepatan sasaran dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak memerlukan ketepatan data.</p> <p>7. Keterlibatan mitra kerja , PT, Dunia Usaha, Org Masyarakat, Toga, Toma dalam pemenuhan dan perlindungan anak.</p> <p>8. Komitmen OPD/ Masmedia instansi vertikal belum semuanya melaksanakan mandat PUHA</p>	<p>dikuatkan</p> <p>3. Belum adanya Komitmen OPD untuk pelaksanaan Pengarusutamaan hak Anak (PUHA)</p> <p>4. Organisasi Pemerhati Perlindungan Anak dan OPD belum optimal dalam menyuarakan PUHA.</p> <p>5. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis perlindungan anak sehingga layanan perlindungan anak mengalami hambatan untuk penyesuaian.</p> <p>6. Tidak semua korban memahami adanya layanan rujukan korban kekerasan</p>	<p>anak (PATBM , PUSPAGA, PUSPA, APSAI, SPA Kampung KB)</p> <p>4. Tersedianya mekanisme pendataan anak korban kekerasan melalui Simfoni, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).</p>
3	<p>1. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi Pemerintah yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik</p> <p>2. Peningkatan</p>	<p>1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</p> <p>2. Hasil Evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja yang akan datang.</p> <p>3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.</p>	<p>1. Belum konsistennya penempatan jabatan aparatur dengan keilmuan atau peta jabatan.</p> <p>2. Perlu peningkatan kualitas / keterampilan ASN terutama dalam penguasaan IT untuk menunjang pekerjaan.</p>	<p>1. Regulasi yang memberikn mandat Beberapa urusan dlm tugas fungsi DKP3A TIMUR memudahkan koordinasi</p> <p>2. Beberapa aplikasi perencanaan dan penganggaran telah terkoneksi memudahkan untuk melakukan</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	4. Adanya Mutasi Pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan. 5. Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelayanan internal sehingga berpengaruh terhadap layanan publik. 6. Capaian kinerja belum sepenuhnya optimal, karena capaian bersifat lintas sektor.	3. ASN belum berkomitmen terhadap Dokumen perencanaan program sebagai pedoman	pemantauan capaian kinerja. 3. Adanya sistem kepegawaian yang menunjang capaian kinerja ASN (SAO, SKP, ANJAB dll) 4. Adanya kesempatan bagi ASN untuk mengikuti Bimtek guna peningkatan Kualitas SDM.

III. 5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah antara lain dapat dilakukan dengan metode/cara :

1. Melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang, kasub/kasie dan staf yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode skoring dengan pembobotan:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 3.4
Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
Total		100

- b. Melakukan penilaian (skoring) terhadap seluruh permasalahan. Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1. Data yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif
 2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen masih rendah
 3. Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan tidak semua penegak hukum berkomitmen pada PUG dan PUHA
 4. Tidak maksimalnya fungsi dan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta TPPO
 5. Belum optimalnya Capaian kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3			Kriteria 4	Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Data gender dan anak yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif	5	100	5	100	5	75	5	75	4	120	470	
2	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah	5	100	5	100	5	75	4	60	4	120	455	
3	Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam program KB	5	100	5	100	4	60	4	60	3	90	410	
5	Tidak semua penegak hukum berkomitmen pada PUG dan PUHA	5	100	5	100	5	75	4	60	5	150	485	
4	Tidak maksimalnya fungsi dan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta TPPO	5	100	4	80	3	45	3	45	2	60	330	
6	Belum optimalnya Capaian kinerja Perangkat Daerah	3	60	2	40	2	30	4	60	1	30	220	



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023. Tujuan disesuaikan dengan enam urusan yang diampu melalui DKP3A Prov Kaltim, meliputi :

- a. Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
- b. Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur
- c. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif
- d. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
- e. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
- f. Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome)program Perangkat Daerah.Adapun Sasaran yang ditetapkan meliputi :

- a. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT
- b. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)
- c. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
- d. terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
- e. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
- f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana

IV. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak		Rasio KDRT	%	18.16	27.2	0.048	0.042	0.038
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	72.00	74.00	78.00	89.00	90.00
2	Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur		Persentase pelaku ekonomi perempuan Kaltim	UMKM Perempuan	37	62	50	60	70
		Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	55	60	65	85	100
3	Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif		Peningkatan dokumen administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	%	97	98	99	100	100
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	97	98	99	100	100

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
4	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga		Meningkatnya jumlah kampung KB	Kampung KB	160	175	299	315	330
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	3.66	3.67	2.54	2.52	2.50
5	Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas		Peningkatan pemanfaatan data gender dan anak	%	30	35	40	45	50
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	30	35	40	45	50
6	Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Persentase pencapaian kinerja DKP3A	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana prasarana	persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	100	100	100	100

IV. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	Kekerasan perempuan dan anak Kaltim cenderung meningkat, maka diperlukan strategi dalam pencegahan pelayanan agar angka kekerasan dapat berkurang. Berdasarkan Sistem Informasi On Line perlindungan perempuan dan anak se Kaltim, pada tiga tahun terakhir mengalami turun naik dari 406, 722 dan 287. Walaupun di tahun 2018 menggambarkan adanya penurunan kasus, namun hal tersebut masih menggambarkan adanya pelanggaran hak atas perempuan dan anak, dan perlu mendapatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan	Simfoni PPPA, Administrasi Kependudukan (DKP3A Kaltim), BPS Kaltim	$\frac{\text{Jumlah KDRT/}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PPRG)	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	Pengarusutamaan Gender (PUG) diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kalimantan Timur. Pencapaian pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Sejak tahun 2010 hingga 2019, IPM Provinsi Kalimantan Timur berada diatas angka nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar, namun untuk pencapaian pembangunan manusia berbasis pemberdayaan dan pembangunan gender belum sebaik capaian IPM, menurut data KPPA 2018 rangking IPG Kalimantan Timur di tingkat nasional pada tahun 2018 berada diperingkat ke-31 dari 34 Provinsi	DKP3A	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Kaltim}} \times 100$

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
3	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat meliputi kepemilikan Kartu Keluarga , akte, E-KTP, Kartu Identitas Anak, dll. Ketersediaan administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dll yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga	Administrasi Kependudukan Kabupaten Kota, Direktorat Jendral Kependudukan & Catatan Sipil Kemendagri	$\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$
4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di Kaltim dengan jumlah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) yang memiliki wawasan/pemahaman tentang keluarga secara kholistik dan Responsif gender yang tersedia di Kab/Kota sebagai ujung tombak pengendalian penduduk di daerah	BKKBN, DKP3A	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ <p> Pt = Jumlah Penduduk Pada Tahun Ke t Po = Jumlah Penduduk Pada Tahun Dasar B (birth) = Jumlah Kelahiran Selama Periode 0-t D (death) = Jumlah Kematian Selama Periode 0-t Mo = Jumlah Migrasi Keluar Selama Periode 0-t Mi = Jumlah Migrasi Masuk Selama Periode 0-t </p>
5	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	Data gender atau data pilah merupakan informasi utama dan pertama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat dicapai optimal. Dengan data gender Hasil, Partisipasi, Manfaat, dan fungsi kontrol pembangunan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Penggunaan data gender dalam pembangunan merupakan mandat RPJMNAS, RPJMD yang harus dipedomani dalam pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh Perangkat Daerah.	Administrasi kependudukan (DKP3A kaltim), BPS Kaltim, KPPA-RI	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender/}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

VISI	Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat		
MISI	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT	Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat, penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang
Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Peningkatan Implementasi PUG melalui Pembentukan Focal Point dan Penguatan POKJA PUG, Pembentukan Tim Teknis	Pembentukan focal point yang di fokuskan pada OPD yang belum memiliki FP (Focal Point)
Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas teknis ADB SIAK, Peningkatan kualitas akses jaringan server.	Pembinaan teknis Administrator Database SIAK
Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kualitas penduduk dalam ketahanan keluarga	Pembinaan teknis calon pengantin dalam kesejahteraan dan ketahanan keluarga
Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh DKP3A tahun 2019- 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan/pagu yang bersifar indikatif. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKP3A.

Rencana program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun kedepan dibuat secara bertahap. Program kegiatan sampai dengan tahun 2023 adalah 22 program dan 52 kegiatan. Program kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menetapkan program-program ini, DKP3A membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak				Rasio KDRT	0.066 %	18.16 %		27.2 %		0.048 %		0.042 %		0.038 %		0.038 %		
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT			Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	70%	72%		74%		78%		89%		90%		90%		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,6%			0,7%	900.000.000									
			Kegiatan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tumbuh kembang anak				80 Orang	300.000.000									
				Jumlah Kabupaten/Kota menuju layak anak				20%										
				Jumlah SDM terlatih konvensi hak anak				1100 SDM										
			Kegiatan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak				110 Orang	300.000.000									
				Jumlah Perangkat Daerah FGD perlindungan anak dalam penanggulangan bencana				10 Perangkat Daerah										
				Jumlah kebijakan tentang penurunan angka perkawinan anak				1 Kebijakan										

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan				50 Orang	300.000.000									
				Jumlah Profil perlindungan perempuan Kaltim				1 Profil										
				Jumlah kebijakan perlindungan perempuan				2 Kebijakan										
			PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Rasio KDRT	0,066%			0,054%	200.000.000									
			Kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase Pelayanan Perlindungan terpadu	85%			60%	200.000.000									
			PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90,0%	100%	82.650.000											
			Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Pelayanan Perlindungan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan (Penerimaan pengaduan, rehabilitasi sosial, pengaduan dan bantuan hukum, kesehatan, reintegrasi dan pemulangan)	50%	50%	82.650.000											
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kekerasan terhadap perempuan		0,25	111.000.000											

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Advokasi perlindungan perempuan	Jumlah SDM yang mengikuti advokasi perlindungan perempuan		40 SDM	111.000.000											
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,08%	0,08%	223.985.000	0,07%	300.000.000									
			Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak	Jumlah anak yang mendapatkan KIE tentang hak sipil anak		200 SDM	97.495.000	300	300.000.000									
			Advokasi penetapan Kab/Kota menuju Kota Layak Anak	Jumlah Kab/Kota menuju kota layak anak		5%	126.490.000											
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur		1 Kebijakan	87.390.000											
			Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur	Jumlah peserta yang mengikuti penanaman nilai-nilai luhur		80 SDM	87.390.000											
		2 08 06	[PROGRAM] PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan Pemenuhan Hak Anak						3 Kebijakan	225.000.000	3 Kebijakan	3.348.175.000	3 Kebijakan	224.652.112	9 Kebijakan		
		2 08 06 1 01	[KEGIATAN] Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penguatan pelembagaan PHA						1 Kab/Kota	59.575.000	1 Kab/Kota	200.000.000	1 Kab/Kota	100.000.000	3 Kab/Kota		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 06 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha					30 Organisasi	59.575.000	30 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	50.000.000	90 Organisasi	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 06 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi					1 Dokumen		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 06 1 02	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak					1 dokumen	165.425.000	1 dokumen	3.148.175.000	1 dokumen	124.652.112	1 dokumen			
		2 08 06 1 02 03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	106.525.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	74.652.112	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 06 1 02 04	[SUB KEGIATAN] Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1 Dokumen	58.900.000	1 Dokumen	3.048.175.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 07	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Hak Anak						88%	475.000.000	90%	2.850.000.000	90%	474.265.569	90%		
		2 08 07 1 01	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak						1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen		
		2 08 07 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 07 1 02	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak						1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	2.500.000.000	1 dokumen	274.265.569	1 dokumen		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 –2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 07 1 02 03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen	274.265.569	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 03	[PROGRAM] PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kebijakan Perlindungan Perempuan					4 Kebijakan	551.024.625	4 Kebijakan	3.451.825.000	4 Kebijakan	700.231.926	12 Kebijakan			
		2 08 03 1 01	[KEGIATAN] Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM yang memahami pencegahan kekerasan kekerasan terhadap perempuan					1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	3.451.825.000	1 dokumen	300.000.000	3 dokumen			
		2 08 03 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					20 Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah	451.825.000	30 Perangkat Daerah	150.000.000	30 Perangkat Daerah	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 03 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi					1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	3.000.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		20803102	[KEGIATAN] Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan						0	301.024.625	0	0	1	400.231.926	1		
		2080310201	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat						100 Orang	301.024.625			100 Orang	200.231.926	200 Orang	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2080310202	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi										50 Layanan	200.000.000	50 Layanan	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		20803103	[KEGIATAN] Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan						30 orang	125.000.000	30 orang	0	30 orang	0	90 orang		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 03 1 03 02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					1 Laporan	125000000	1 Laporan		1 Laporan		3 Laporan	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kalimantan Timur				Persentase pelaku ekonomi perempuan	34 UMKM Perempuan	37 UMKM Perempuan		62 UMKM Perempuan		50 UMKM Perempuan		60 UMKM Perempuan		70 UMKM Perempuan		70 UMKM Perempuan		
	Meningkatkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan			Persentase perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	50%	55%		60%		65%		85%		100%		100%		
			PROGRAM KESETARAAN GENDER	Proporsi perempuan yang berada pada posisi jabatan manajerial	50%			70%	900.000.000									
			Kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	100 Orang			100 Orang	300.000.000									
				Persentase perempuan dalam jabatan politik	8%			10%										
				Jumlah Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	1 kebijakan			2 Kebijakan										
				Jumlah profil Pembangunan berbasis gender	1 Profil			2 Profil										

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang sosial dan budaya				100 Orang	300.000.000									
				Jumlah program kegiatan berbasis PPRG				10 Program										
				Jumlah kebijakan PUG	1 Kebijakan			1 Kebijakan										
				Peningkatan peringkat Evaluasi dan pemantauan PUG	Madya			Madya										
			Kegiatan kesetaraan gender bidang Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang ekonomi	120 Orang			350 Orang	300.000.000									
				Jumlah usaha KK Perempuan berbasis ICT				50 Usaha										
				Jumlah Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) yang dibina	5 Desa Prima			5 Desa Prima										
				Jumlah forum koordinasi dan sinkronisasi kesetaraan gender bidang ekonomi				1 Forum										
			PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaku ekonomi perempuan	34%	48%	158.900.000											
				Persentase perempuan miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11,45%			0,11	150.000.000									

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Peningkatan Kewirausahaan perempuan	Jumlah peserta yang mendapatkan keterampilan berwirausaha	70 Peserta	70 Peserta158.900.000	169 Peserta150.000.000											
			PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1 Kebijakan	1 Kebijakan395.480.000,00												
			Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah Kebijakan keterlibatan perempuan dalam politik dan jabatan publik	1 kebijakan	1 kebijakan118.700.000												
			Rakor pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah kebijakan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi276.780.000												
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Proporsi perempuan yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)	40%	40%658.425.000,00												
			Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah kajian pembangunan berbasis gender	1 Kajian	1 Kajian282.975.000												
			Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan advokasi dan pembinaan	12 Kelompok	12 Kelompok112.750.000												
			Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	220 Orang	220 Orang262.700.000												

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	100%	100%	47.500.000											
			penyuluhan bagi ibu rumah tangga perempuan dalam membangun keluarga di bidang ekonomi	Jumlah Kepala rumah tangga yang mendapatkan Penyuluhan ekonomi	50 Orang	50 Orang	47.500.000											
		2 08 02	[PROGRAM] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG						1 Kebijakan	999.325.201	1 Kebijakan	1.200.000.000	1 Kebijakan	946.947.708	3 Kebijakan		
		2 08 02 1 01	[KEGIATAN] Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	penguatan kelembagaan PUG						3 lembaga PUG	300.000.000	7 lembaga PUG	450.000.000	10 lembaga PUG	300.000.000	10 lembaga PUG		
		2 08 02 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi						1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 02 1 01 03	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi						25 Perangkat Daerah	100.000.000	30 Perangkat Daerah	100.000.000	35 Perangkat Daerah	100.000.000	35 Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 08 02 1 01 04	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)						25 Perangkat Daerah	120.000.000	30 Perangkat Daerah	100.000.000	35 Perangkat Daerah	100.000.000	35 Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 02 1 02	[KEGIATAN] Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pengembangan SDM perempuan bidang politik dan hukum						1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	250.000.000	3 dokumen		
		2 08 02 1 02 01	[SUB KEGIATAN] Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 02 1 02 02	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuptaen/Kota						25 Organisasi	100.000.000	30 Organisasi	150.000.000	35 Organisasi	100.000.000	35 Organisasi	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 02 1 03	[KEGIATAN] Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan						1 dokumen	449.325.201	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	396.947.708	3 dokumen		
		2 08 02 1 03 01	[SUB KEGIATAN] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan						20 Lembaga	100.000.000	25 Lembaga	200.000.000	30 Lembaga	100.000.000	35 Lembaga	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 02 1 03 02	[SUB KEGIATAN] Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						100 Orang	100.000.000	125 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	375 Orang	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 02 1 03 03	[SUB KEGIATAN] Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia						1 Dokumen	249.325.201	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	196.947.708	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas				Peningkatan pemanfaatan data gender	25%	30%		35%		40%		45%		50%		50%		
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender	25%	30%		35%		40%		45%		50%		50%		
			PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan				70%	750.000.000									
			Kegiatan data dan informasi gender	Persentase data gender				50%	250.000.000									
				jumlah pokja data pilah				30 Pokja										
			Kegiatan data dan informasi anak	jumlah data pilah anak dengan OPD terkait				30 Data Pilah	250.000.000									
				Persentase data anak				50%										
			Kegiatan informasi dan partisipasi	Jumlah peserta Rakortek SIGA				100 Orang	250.000.000									
				Kebijakan terkait pengembangan sistem informasi gender dan anak (SIGA)				1 Kebijakan										

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM PENGEMBANGAN BASIS DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	45%	45%	319.500.000											
			Sinergitas pelaksanaan pengumpulan dan pengayaan data gender dan anak	Persentase data pilah yang tersedia	50%	50%	319.500.000											
		2 08 05	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Capaian Data Gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan berdasarkan Data Pilah						65%	500.000.000	70%	1.000.000.000	75%	400.000.000	75%		
		2 08 05 1 01	[KEGIATAN] Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	persentase data gender dan anak yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan						65%	500.000.000	70%	1.000.000.000	75%	400.000.000	75%		
		2 08 05 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia						1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 05 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif			[TUJUAN] Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih update dan komprehensif	Peningkatan dokumen administrasi keendudukan dan pemanfaatan data kependudukan	96%	97%				98%		99%		100%		100%		

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan		[SASARAN] Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	persentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	96%	97%		98%		99%		100%		100%		100%		
			PROGRAM FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan				70%	750.000.000									
			Kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pendaftaran penduduk				100 Orang	250.000.000									
			Kegiatan bina aparatur pencatatan sipil	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bina aparatur pencatatan sipil				100 Orang	250.000.000									
			Kegiatan monitoring, evaluasi dan dokumentasi	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan				10 Perangkat Daerah	250.000.000									
			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DAK)	Persentase penduduk yang memperoleh akses pelayanan administrasi kependudukan	85%	85%	2.187.142.000	90%	1.700.000.000									
			Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Persentase penduduk yang mendapatkan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	97,74%	1,01%	1.671.072.000	0,36%	1.700.000.000									
			Pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data adminduk	5%	5%	516.070.000											

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 12 03	[PROGRAM] PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kebijakan terkait pencatatan sipil					6 Kebijakan	170.000.000	6 Kebijakan	250.000.000	6 Kebijakan	169.737.151	18 Kebijakan			
		2 12 03 1 01	[KEGIATAN] Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kebijakan terkait pelayanan catatan sipil Kab/Kota se-Kaltim					6 dokumen	170.000.000	6 dokumen	250.000.000	6 dokumen	169.737.151	18 dokumen			
		2 12 03 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan					1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	169.737.151	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 12 02	[PROGRAM] PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk					6 Kebijakan	4.680.000.000	6 Kebijakan	400.000.000	6 Kebijakan	4.672.763.920	18 Kebijakan			
		2 12 02 1 01	[KEGIATAN] Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah kebijakan terkait pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota se-Kaltim					6 dokumen	4.680.000.000	6 dokumen	400.000.000	6 dokumen	4.672.763.920	18 dokumen			
		2 12 02 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan					1 Dokumen	4.680.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	4.672.763.920	1 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 12 04	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan					5 Kebijakan	478.353.000	5 Kebijakan	1.576.175.000	5 Kebijakan	477.613.385	15 Kebijakan			
		2 12 04 1 01	[KEGIATAN] Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data kependudukan					3 dokumen	478.353.000	3 dokumen	1.576.175.000	3 dokumen	477.613.385	9 dokumen			

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 12 04 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Tata Cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Dokumen	328.353.000	1 Dokumen	1.326.175.000	1 Dokumen		3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 12 04 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	477.613.385	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga				Meningkatnya jumlah kampung KB	154 Kampung KB	160 Kampung KB		175 Kampung KB		299 Kampung KB		315 Kampung KB		330 Kampung KB		330 Kampung KB		
	terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			laju pertumbuhan penduduk	3.65 %	3.66 %		3.67 %		2.54 %		2.52 %		2.50 %		2.50 %		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga (LSM)	50%			70%	750.000.000									
			Kegiatan Pengendalian Penduduk	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pengendalian penduduk	1200 Orang			230 Orang	250.000.000									
			Kegiatan Kualitas Keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kualitas keluarga	60 Orang			15 Orang	250.000.000									

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kegiatan Keluarga Berencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keluarga berencana	1050 Orang			400 Orang	250.000.000									
			PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	100%	100%	225.800.000											
			Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Pelayanan KIE dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	100 Orang	100 Orang	225.800.000											
			PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi , Edukasi)	100 Orang	100 Orang	95.900.000											
			Forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	100 Orang	100 Orang	95.900.000											
		2 14 04	[PROGRAM] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1 Kebijakan	160.000.000	1 Kebijakan	200.000.000	1 Kebijakan	159.752.613	3 Kebijakan		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 –2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 14 04 1 01	[KEGIATAN] Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga					1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	159.752.613	3 dokumen			
		2 14 04 1 01 03	[SUB KEGIATAN] Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	159.752.613	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi	
		2 14 03	[PROGRAM] PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					33%	150.000.000	40%	300.000.000	50%	149.768.074	50%			
		2 14 03 1 01	[KEGIATAN] Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	peningkatan jumlah peserta KB					1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	149.768.074	3 dokumen			
		2 14 03 1 01 05	[SUB KEGIATAN] Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	49.768.074	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Provinsi	
		2 14 03 1 01 07	[SUB KEGIATAN] Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal					1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Provinsi	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 14 03 1 01 08	[SUB KEGIATAN] Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi						1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 14 02	[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kebijakan tentang pengendalian penduduk						1 Kebijakan	150.000.000	1 Kebijakan	500.000.000	1 Kebijakan	149.768.074	3 Kebijakan		
		2 14 02 1 01	[KEGIATAN] Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kebijakan tentang pengendalian penduduk						1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	500.000.000	5 dokumen	149.768.074	7 dokumen		
		2 14 02 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi						1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	149.768.074	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana				persentase capaian kinerja DKP3A	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat sipil negara serta sarana dan prasarana			persentase capaian kinerja aparat sipil negara DKP3A	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	90%	1.675.214.000	90%	1.700.000.000									
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	1.675.214.000	1 Tahun	1.700.000.000									
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0%	1%	1.559.826.000	1%	3.990.000.000									
			Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	47 Sapras	47 Sapras	1.559.826.000	55 Sapras	3.990.000.000									
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	60%	594.000.000	60%	710.000.000									
			Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	persentase capaian target kinerja	70 Trip	70 Trip	540.000.000	80 Trip	650.000.000									
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Diklat yang diikuti Pegawai	4 Diklat	4 Diklat	54.000.000	6 Diklat	60.000.000									

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64%	65%	248.360.000	67%	450.000.000									
			Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen laporan capaian kinerja	5 Laporan	5 Laporan	248.360.000	5 Laporan	100.000.000									
			Rakor Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi rakor pemberdayaan perempuan				1 Rekomendasi	150.000.000									
			Forum RKP Bidang Kependudukan, PP dan PA	Jumlah dokumen Bidang Kependudukan, PP dan PA				2 Rekomendasi	100.000.000									
			Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti				2 Pameran	100.000.000									
		2 08 01	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak						90%	14.496.914.174	95%	16.495.678.574	100%	14.474.499.468	100%		
		2 08 01 1 05	[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan pegawai						0%	0	100%	727.220.000	100%	700.000.000	100%		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 –2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 01 1 05 11	[SUB KEGIATAN] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30 Orang		30 Orang	507.320.000	30 Orang	500.000.000	90 orang	DKP3A	Samarinda dan Luar Provinsi
		2 08 01 1 05 02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						3 Paket		3 Paket	219.900.000	3 Paket	200.000.000	3 Paket	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 02	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran DKP3A Prov. Kaltim						90 %	9.344.839.000	95 %	10.639.160.175	100 %	9.899.499.468	12 bulan		
		2 08 01 1 02 05	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda dan Luar Provinsi
		2 08 01 1 02 07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1 Laporan		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda dan Luar Provinsi
		2 08 01 1 02 01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						40 Orang/ 12 Bulan	9.344.839.000	40 Orang/ 12 Bulan	10.609.160.175	40 Orang/ 12 Bulan	9.344.839.000	40 Orang/ 12 Bulan	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06	[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik						90%	989.167.624	95%	1.741.733.103	100%	1.010.000.000	100%		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 01 1 06 02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						10 Paket		10 Paket	224.621.000	10 Paket	100.000.000	30 Paket	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06 01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						20 Paket		20 Paket	18.161.603	20 Paket	20.000.000	60 Paket	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06 05	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						10 Paket		10 Paket	90.032.500	10 Paket	100.000.000	30 Paket	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06 06	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1 Dokumen		1 Dokumen	13.440.000	1 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06 08	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan		1 Laporan	107.025.000	1 Laporan	70.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 06 09	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1 Laporan	989.167.624	1 Laporan	1.288.453.000	1 Laporan	700.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 01 1 09	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang digunakan dan berfungsi baik						90 %	1.571.183.635	95 %	305.486.000	100 %	300.000.000	100%		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 01 1 09 11	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit		5 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	20 Unit	DKP3A	Samarinda	
		2 08 01 1 09 02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	1.571.183.635	20 Unit	205.486.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	DKP3A	Samarinda	
		2 08 01 1 07	[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya					20%	0	20%	560.127.000	20%	100.000.000	60%			
		2 08 01 1 07 06	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit		5 Unit	560.127.000	10 Unit	100.000.000	25 Unit	DKP3A	Samarinda	
		2 08 01 1 08	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan di tempat kerja					60%	2.137.648.540	62%	2.209.952.296	64%	2.165.000.000	64%			
		2 08 01 1 08 01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan		1 Laporan	14.900.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda	
		2 08 01 1 08 04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	2.137.648.540	1 Laporan	1.770.897.296	1 Laporan	1.800.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2 08 01 1 08 03	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Laporan		1 Laporan	53.400.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 08 02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan		1 Laporan	370.755.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 01	[KEGIATAN] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran DKP3A yang tepat waktu dan tepat proses						90%	454.075.375	95%	312.000.000	100%	300.000.000	68%		
		2 08 01 1 01 01	[SUB KEGIATAN] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	454.075.375	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	DKP3A	Samarinda dan Luar Provinsi
		2 08 01 1 01 06	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan		1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda dan Luar Provinsi
		2 08 01 1 01 07	[SUB KEGIATAN] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi
		2 08 01 1 01 04	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						2 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	DKP3A	Samarinda
		2 08 01 1 01 02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2 Dokumen		2 Dokumen	112.000.000	2 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	DKP3A	Samarinda, Balikpapan, Bontang Kutim, Kubar, Kukar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan luar Povinsi



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2019-2023.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.

Pembangunan 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan ditujukan untuk mendukung pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan
Dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Rasio KDRT	%	0.066	18.16	27.2	0.048	0.042	0.038	0.038
2	Persentase kasus korban kekerasan perempuan dan anak Provinsi Kaltim yang terselesaikan	%	70.00	72.00	74.00	78.00	89.00	90.00	90.00
3	Persentase pelaku ekonomi perempuan Kaltim	UMKM Perempuan	34	37	62	50	60	70	70
4	Persentase Perangkat daerah yang menyusun anggaran dan perencanaan yang responsif gender	%	50	55	60	65	85	100	100
5	Peningkatan dokumen administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	%	96	97	98	99	100	100	100
6	Presentase penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	%	96	97	98	99	100	100	100

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 –2023 DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
7	Meningkatnya jumlah kampung KB	Kampung KB	154	160	175	299	315	330	330
8	Laju pertumbuhan penduduk	%	3.65	3.66	3.67	2.54	2.52	2.50	2.50
9	Peningkatan pemanfaatan data gender dan anak	%	25	30	35	40	45	50	50
10	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender	%	25	30	35	40	45	50	50
11	Persentase pencapaian kinerja DKP3A	%	100	100	100	100	100	100	100
12	persentase capaian kinerja aparatur sipil negara DKP3A	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

VII. 1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025.

VII. 2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.